



FAKULTAS EKONOMI & BISNIS
UNISBA

ANALISA MODEL PEMBERDAYAAN UKM DI KOTA CIMAHI

survei pada ukm makanan, kerajinan dan
fashion

SEPTIANA AYU ESTRI MAHANI



BAB 1

Pendahuluan

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) memang tengah menjadi primadona. Alokasi anggaran untuk usaha ini hampir cukup besar dari Total Anggaran Pendapatan Belanja Daerah di setiap daerah. Banyak program yang telah dijalankan untuk memberdayakan UMKM sejak hampir 20 tahun yang lalu, namun hasilnya sampai saat ini belum menggembirakan. Sehingga perlu dicarikan format baru yang berbeda dengan yang sebelumnya agar UMKM tidak jalan di tempat. Dibutuhkan usaha-usaha strategik guna memberdayakan UMKM agar dapat menjadi penopang perekonomian seperti yang terjadi di Jepang dan Taiwan.

Kini UMKM memiliki peluang untuk terus berkembang. Perkembangan UMKM di Kota Cimahi terhambat sejumlah persoalan, untuk dapat memperkecil kelemahan yang ada berdasarkan masalah yang menghambat pengembangan UMKM, maka dibutuhkan sebuah program pemberdayaan UMKM yang komprehensif berdasarkan tahapan bisnis real yang terdapat di UMKM Kota Cimahi.

Pemberdayaan tersebut menggunakan pendekatan partisipatif berdasarkan kondisi kontekstual sesuai dengan klaster UMKM masing-masing. Dari data Dinas UMKM Kota Cimahi diperoleh informasi bahwa terdapat 4 (empat) Klaster UMKM dimana masing-masing memiliki tahapan bisnis yang berbeda-beda. Dalam konsep pemberdayaan pendekatan pembinaan harus mengacu pada tahapan bisnis masing-masing.

1.1. Identifikasi Masalah

Beberapa hal yang masih menjadi penghambat dalam pengembangan UMKM ditinjau dari dua faktor yaitu faktor internal dan faktor eksternal UMKM, dimana masing-masing faktor harus bersinergi untuk memperoleh hasil yang maksimal.

- a. Faktor Internal : merupakan masalah klasik dari UMKM yaitu lemah dalam segi permodalan dan segi manajerial (kemampuan manajemen, produksi, pemasaran dan sumber daya manusia)



- b. Faktor Eksternal : merupakan masalah yang muncul dari pihak pengembang dan pembina UMKM, misalnya solusi yang diberikan tidak tepat sasaran, tidak adanya monitoring dan program yang tumpang tindih antar institusi.

Yang menyebabkan munculnya masalah tersebut adalah ketidaktersediaan “Data Base dan Pemetaan UMKM” aktif di Kota Cimahi yang memudahkan bagi pengambil keputusan mengembangkan UMKM, untuk menghindari adanya tumpang tindih program atau tidak tepat sasaran. Data base tersebut memuat informasi lengkap terkini tentang UMKM antara lain jenis produksi, omset, waktu berdiri, kelemahan-kelemahan ditinjau dari fungsional, bantuan atau pembinaan yang pernah atau sedang diterima, kemajuan pasca pembinaan, pangsa pasar yang ada dan lain-lain. Substansi data base secara lengkap ditunjukkan lampiran. Data base ini diharapkan bisa di akses oleh para UMKM, untuk setiap waktu bisa mengupdate data yang dimiliki, dengan memberikan password pada setiap UMKM.

1.2. Maksud dan Tujuan

Tujuan workshop ini adalah memperoleh rekomendasi berdasarkan Data Base aktif dan pemetaan UMKM se-Kota Cimahi yang dapat digunakan para pengambil keputusan untuk meningkatkan dan mengembangkan UMKM potensial di Kota Cimahi dengan membuat kriteria dari setiap UMKM.

a. Maksud

- Melakukan kajian penyusunan pedoman pemberdayaan pelaku UMKM Kota Cimahi
- Melakukan klasifikasi pelaku UMKM berdasarkan kapasitas usahanya dan potensi marketnya

b. Tujuan

- Menciptakan pedoman alternative mekanisme pemberdayaan pelaku UMKM Kota Cimahi
- Memberikan panduan mekanisme operasional pemberdayaan pelaku UMKM Kota Cimahi

1.3. Target/Sasaran



Tersedianya dokumen kajian pedoman pemberdayaan UMKM Kota Cimahi

1.4. Ruang Lingkup Pengadaan /Lokasi dan Data dan Fasilitas Penunjang

- a. Ruang lingkup pekerjaan :
- Pelaksanaan studi pemberdayaan pelaku UMKM,
 - Penyusunan pedoman alternative mekanisme pemberdayaan pelaku UMKM, dan
 - Penyusunan contoh format monev pemberdayaan pelaku UMKM

1.5. Lokasi Pekerjaan, Data dan Fasilitas

- b. Lokasi Pekerjaan : Kota Cimahi
- c. Data dan fasilitas yang dapat disediakan oleh PA/KPA/PPK :
- Data awal jumlah pelaku UMKM Kota Cimahi
 - Data sekunder

1.6. Produk yang Dihasilkan

Hasil produk yang dihasilkan :

- Laporan hasil studi pemberdayaan pelaku UMKM
- Pedoman alternative pemberdayaan pelaku UMKM
- Contoh Format monev pemberdayaan pelaku UMKM

1.7. Waktu Pelaksanaan yang Diperlukan

Waktu yang diperlukan : 2 (dua) bulan



BAB 2

Landasan Hukum, Konsep dan Istilah

2.1. Landasan Hukum

- Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia No. 10/Per/M.Kukm/IX/2015 Tentang Kelembagaan Koperasi
- UU No.20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah
- UU No. 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil
- PP No. 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan
- PP No. 32 Tahun 1998 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil
- Inpres No. 10 Tahun 1999 tentang Pemberdayaan Usaha Menengah
- Keppres No. 127 Tahun 2001 tentang Bidang/Jenis Usaha Yang Dicadangkan Untuk Usaha Kecil dan Bidang/Jenis Usaha Yang Terbuka Untuk Usaha Menengah atau Besar Dengan Syarat Kemitraan
- Permeneg BUMN Per-05/MBU/2007 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan

2.2. Konsep

- Pemberdayaan adalah upaya yang dilakukan Pemerintah, Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan masyarakat secara sinergis



dalam bentuk penumbuhan iklim dan pengembangan usaha terhadap Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi usaha yang tangguh dan mandiri.

- Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro
- Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil
- Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan
- Usaha Besar adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari Usaha Menengah, yang meliputi usaha nasional milik negara atau swasta, usaha patungan, dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia.

2.3. Istilah

1. MODEL PEMBERDAYAAN

Gambaran Mekanisme Proses Pemberdayaan di Kota Cimahi berdasarkan kategori Sektor Kuliner, Sektor Kerajinan/ Craft, Sektor Textile & Garmen, Sektor Telematika

2. UKM Kuliner

Usaha Kecil Menengah yang bergerak dibidang usaha pengolahan dan penjualan aneka jenis produk berbasis kuliner/ Food Processing



3. UKM Kerajinan/ Craft

Usaha Kecil Menengah yang bergerak dibidang Teknologi Tepatguna Pengolahan Kriya/ berbahan dasar Kayu, bamboo, Logam dan Mesin serta lain-lain

4. UKM Garment & Textile

Usaha Kecil Menengah yang bergerak dibidang pengolahan Tekstile dan Garment berbahan dasar benang, serat, kapas, dll

5. UKM Telematika

Usaha Kecil Menengah yang bergerak di bidang telematika untuk jenis Games, Animasi, Musik, Sosial Media dan E-Commerce

6. Pelatihan

Proses Peningkatan Kemampuan baik secara Pola Pikir (Kognisi) , Pola Sikap (Afektsi) dan Pola Tindak (Psikomotorik) yang dilakukan dalam kurun waktu tertentu dengan tujuan meningkatkan wawasan dan kompetensi

7. Achievement Motivation Training & Coaching

Pendampingan untuk meningkatkan motivasi berprestasi para pelaku usaha ukm agar selalu memiliki semangat dalam mengelola usaha dan tetap bertahap di masa sulit sekalipun

8. Relation & Komunitas

Pola Interaksi Para Pelaku UKM sebagai media silaturahmi secara berkala guna meningkatkan kemampuan teknis, operasional dan wawasan serta saling belajar

9. Informasi & Edukasi

Media Interaksi untuk meningkatkan skill dan wawasan dalam bentuk e-magazines dan TV UMKM

10. Financial Support

Bantuan Teknis dan Pengaraahn bidang Keuangan UMKM berkaitan dengan Krdit Investasi, Kredit Modal Kerja dan Pengelolaan Bisnis

11. Marketing Support



Bantuan Teknis dan Pengarahan bidang Manajemen Pemasaran meliputi Klinik Branding, Packaging, dan E commerce

12. Promosi Support

Promosi produk / Jasa yang dihasilkan oleh UMKM melalui peningkatan relasi komunitas dan Promo Perdagangan.

13. Omzet

14. Bisnis Development

15. Franchise System



BAB 3

POTRET PEMBERDAYAAN UMKM DI KOTA CIMAHI

3.1. Selayang Pandang Potret UMKM Kota Cimahi

Krisis ekonomi tahun 1997 sampai dengan tahun 1998 merupakan lembaran paling suram dalam sejarah perekonomian di tanah air, sehingga banyaknya pemutusan hubungan kerja (PHK) diberbagai perusahaan. Namun disisi lain usaha kecil menengah (UKM) tetap bertahan, bahkan ada yang menyatakan bahwa usaha kecil menengah (UKM) merupakan sabuk pengaman perekonomian nasional dan sampai saat ini merupakan penopang perekonomian masyarakat kecil dan menengah. Berdasarkan data Kementerian Koperasi Usaha Kecil Menengah, di Indonesia sektor Usaha Kecil menengah (UKM) mampu menyedot 91,8 juta tenaga kerja dari 113,83 juta angkatan kerja.¹ UKM juga memiliki kontribusi besar terhadap PDB (Pendapatan Domestik Bruto) hingga 55,6 persen atau Rp. 2.6094 triliun.

Kontribusi UKM bagi Jawa Barat pun tak kalah tinggi, dimana sebanyak 8,21 juta unit UKM di Jabar sanggup menyerap 13,79 juta orang atau 88,5 persen total tenaga kerja di Jawa Barat. UKM menyumbang sedikitnya 60,34 persen PDRB Jawa Barat Tahun 2009. Sehingga, Usaha Kecil Menengah (UKM) dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) telah memiliki kontribusi yang sangat besar dalam membantu perekonomian Indonesia sehingga dalam kiprahnya terbukti dapat meningkatkan Produk Domestik Bruto (PDB) dan penyerapan tenaga kerja unskilled yang ilmunya tidak harus didapatkan dari bangku pendidikan formal.

Keberhasilan pengembangan Usaha Kecil Menengah (UKM) dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang mampu bertahan dari krisis ekonomi global, baik nasional maupun dunia internasional. Hal ini terbukti dari adanya pengakuan Presiden Barack Obama terhadap konsep kewirasusahaan Goris Mustaqim, seorang usahawan muda berumur 27 Tahun kelahiran Tarogong Garut.² Goris adalah penggagas program gerakan kewirausahaan dikalangan mahasiswa (Innovative Entrepreneurship Challenge) se-Jawa dan Bali tahun 2007 dan membentuk paguyuban, kemudian menghimpun para pemuda dari dalam dan luar negeri yang memiliki idealisme untuk membangun daerah, sehingga terhimpun Usaha Kecil Menengah (UKM). Ungkapan terkenal yang Goris sampaikan yaitu: “bahwa



program pemerintah tidak lanjut, hanya aksi saja, seharusnya modelnya seperti Amerika, salah satu yang bikin wirausaha berkembang adalah “supporting system”.

Metoda di kampus berupa pembinaan pembinaan semacam pusat incubator bisnis. Jadi kampus menjadi pusat pembibitan wirausahawan handal yang kelak akan menjalankan dan memajukan roda ekonomi bangsa, sehingga mahasiswa didorong untuk berwirausaha oleh pemerintah. Pembinaan sangat penting, karena yang pertama dibutuhkan adalah mindset. Mindset itu bukan skill, sehingga perlu dikuatkan lebih dulu. Dana hibah tidak tepat, sebaiknya memberikan kailnya, walaupun ada dana hibah sebaiknya bekerja sama badan-badan yang berpengalaman misal dikampus ada inkubator, atau badan kusus yang dibentuk sehingga professional, artinya selain menyalurkan juga bikin targetnya jelas. Dengan pengembangan baik di universitas maupun dikampung halamannya, sehingga meraih kesuksesan terbaik ditingkat asia, dalam hal ini diakui oleh presiden adikuasa yaitu Barrack Obama.

Kesuksesan dalam mengembangkan Usaha Kecil Menengah (UKM) dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) juga telah dibuktikan daerah lain misal Batam dengan mampu meningkatkan pengembangan industri kreatif yaitu tempurung kelapa, Bali dan Yogyakarta, dan Solo terkenal dengan batiknya yang mampu menembus pasar dunia. Usaha Kecil Menengah (UKM) dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), dewasa ini mendapat perhatian khusus oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah kota/kabupaten dengan melalui berbagai kebijakan dan program-program. Kontribusi terbesar dalam pembangunan ekonomi di Kota Cimahi pada tahun 2013/2014 didominasi oleh sektor industry pengolahan.

Sumber data sektor industri ini diperoleh dari hasil survei tahunan perusahaan industri besar/sedang. Dalam pengumpulan data statistik industri, yang dimaksud dengan industri besar adalah perusahaan dengan jumlah pekerja 100 orang atau lebih, industri sedang dengan jumlah pekerja antara 20 sampai dengan 99 orang, sedangkan Industri kecil mempunyai pekerja antara 5 sampai dengan 19 orang dan perusahaan yang mempunyai pekerja kurang dari 5 orang disebut usaha rumah tangga.

Pengembangan selanjutnya dilakukan melalui program Kelompok Usaha Bersama (Kube) yang berpola kelompok dan bantuan modal untuk Usaha Kecil Menengah (UKM) dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). Akan tetapi, sampai tahun 2013 untuk pendataan Usaha Kecil Menengah (UKM) dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Kota Cimahi, datanya telah sesuai dengan yang diharapkan. Hal ini teridentifikasi dari data yang diperoleh masih belum sesuai dengan kriteria yang berlaku dan terintegrasi secara online dan Updating secara berkala, dimana dalam data UKM yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Cimahi khususnya Disperekop Kota Cimahi, tidak saja hanya memuat data mengenai *target market, asset, omzet, profit, dan jumlah pegawai juga terdapat data prospek pasar dan Detil harga harian untuk pasar dan data profile pasar dalam e-umkm*. Model data tersebut sudah menyesuaikan dengan kriteria UMKM berdasarkan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dinyatakan bahwa :

1. Kriteria Usaha Mikro



- a. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp.50.000.000 (limapuluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
- b. Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp.300.000.000 (tigaratus juta rupiah)

2. Kriteria Usaha Kecil

- a. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp.50.000.000 (limapuluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp.500.000.000 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
- b. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp.300.000.000 (tigaratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 2.500.000.000 (dua milyar lima ratus juta rupiah)

3. Kriteria Usaha Menengah

- a. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp.500.000.000 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp.10.000.000.000 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
- b. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp.2.500.000.000 (dua milyar limaratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 50.000.000.000 (lima puluh milyar rupiah)

Data yang valid dan sesuai aturan merupakan salah satu unsur keberhasilan dalam mendukung suksesnya program peningkatan dan pemberdayaan UMKM di Kota Cimahi. Sampai saat ini, jumlah UMKM yang terdaftar di Dinas Perekonomian, Koperasi dan UMKM Kota Cimahi masih dinamis dimana jumlah terakhir yang terdata berdasarkan hasil pendataan penyuluh KUMKM Kota Cimahi Periode Januari S/D Desember 2015 sebanyak 6.568 KUMKM tanpa kriteria normatif sebagaimana yang disebutkan di atas.

Berdasarkan informasi awal dari Kepala Bidang Koperasi dan UKM Kota Cimahi menyatakan bahwa pengembangan UMKM di Kota Cimahi terhambat oleh kurangnya data yang dimiliki lembaga (Disperekop dan UKM) mengenai kondisi UKM yang ada. Selain itu, melihat hasil evaluasi lapangan dan perkembangan tahun 2013, banyak UMKM yang tidak mampu melanjutkan usahanya sebagai akibat sulitnya akses pemasaran produk.

Temuan awal masalah lainnya adalah

1. Belum Optimalnya Program Pembinaan UMKM yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kota Cimahi
2. Belum Terdapat Pola / Model Pemberdayaan yang Terintegrasi baik dalam mekanisme memberikan bantuan modal dan Peningkatan Kapasitas manajerial dan peluang pemasaran
3. Pendampingan UMKM yang sudah memperoleh bantuan modal dari Pemerintah Kota Cimahi
4. Fasilitator Pendamping UMKM Belum Bekerja Secara Optimal baik di lapangan maupun dalam kordinasi per Sektor

Berdasarkan uraian di atas, maka dengan melihat kondisi perkembangan UMKM di Kota Cimahi Pemerintah Kota Cimahi wajib memiliki program yang mampu memberdayakan UMKM.



3.2. Kondisi Eksisting UMKM

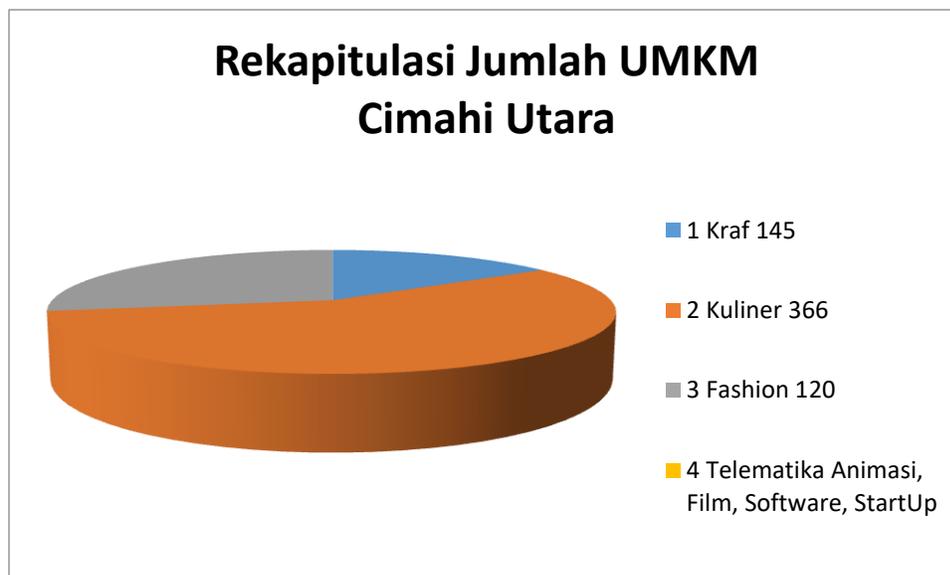
UMKM Kota Cimahi Terdiri dari 4 Klaster Industri yang terdiri dari Klaster Kuliner, Klaster Fashion, Klaster Kerajinan, Klaster Telematika tersebar di 3 Wilayah Kecamatan Cimahi Utara, Cimahi Selatan dan Cimahi Tengah, Berikut gambaran secara umum kategori UMKM berdasarkan Klaster Per Kecamatan yang menjadi Pengamatan terlihat di Tabel berikut ini

3.2. a UMKM Wilayah Cimahi Utara

Tabel Rekapitulasi UMKM Wilayah Cimahi Utara

NO	JENIS PRODUK	JENIS UMKM				NOTED
		Mikro	Kecil	Menengah	Besar	
1	Kraf	145	42	9	0	196
2	Kuliner	366	153	5	0	524
3	Fashion	120	75	0	0	195
4	Telematika	Animasi, Film, Software, StartUp				915

Sumber : Databased UMKM 2014



Dari Tabel diatas tampak bahwa UMKM di tingkat Mikro merupakan jumlah UMKM Mikro yang terbesar sebanyak 366 UMKM jika dibandingkan UMKM Kradf maupun Fashion, hampir 50% dari jenis UMKM lainnya, Melihat fenomena tersebut tampaknya hampir sebagian besar UMKM Jenis Kuliner Kota Cimahi khususnya di wilayah Cimahi Utara masih berada di tingkat bisnis di level Introduction.



Jumlah UMKM yang prospektif lain adalah UMKM Kraf yang sangat bervariasi jenis kerajinan baik berbahan dasar logam, kayu, rotan, plastic dan kain perca dibandingkan UMKM Fashion yang memiliki jumlah Pelaku Usaha tidak terlalu berlimpah, tapi memiliki omzet yang cukup besar dibandingkan Kraf dan Atau logam.

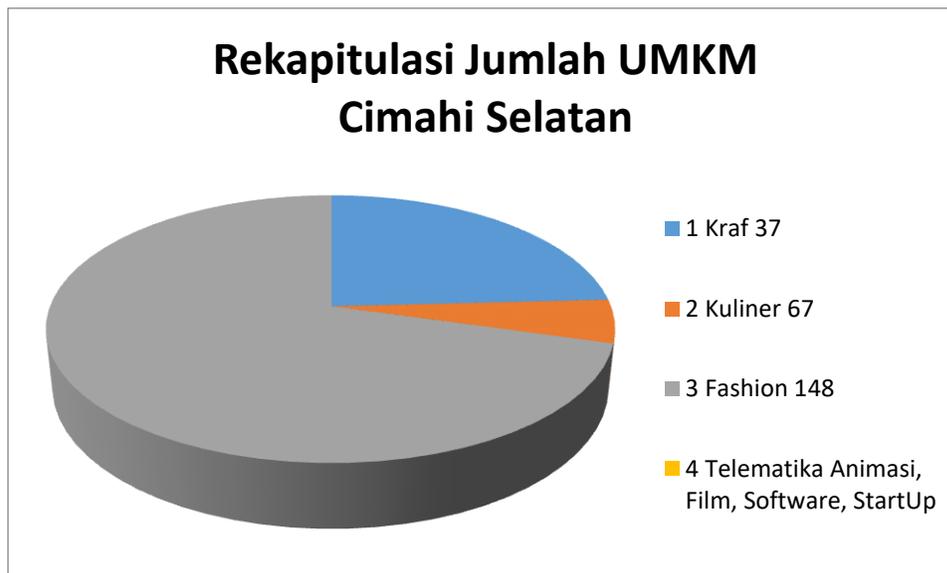
Wilayah Cimahi Utara di dominasi oleh Kontur Berbukit dengan Jumlah

3.2.b Profil UMKM di Wilayah Cimahi Selatan

Tabel UMKM Wilayah Cimahi Selatan

NO	JENIS PRODUK	JENIS DATA				NOTED
		Mikro	Kecil	Menengah	Besar	
1	Kraf	37	37	2	0	76
2	Kuliner	67	8	2	0	77
3	Fashion	148	108	15	8	279
4	Telematika	Animasi, Film, Software, StartUp				432

Sumber : Databased UMKM 2014



Dari Tabel diatas tampak bahwa UMKM di tingkat Mikro merupakan jumlah UMKM Mikro yang terbesar sebanyak 366 UMKM jika dibandingkan UMKM Kradf maupun Fashion, hampir 50% dari jenis UMKM lainnya, Melihat fenomena tersebut tampaknya hampir sebagian besar UMKM Jenis Kuliner Kota Cimahi khususnya di wilayah Cimahi Utara masih berada di tingkat bisnis di level Introduction.



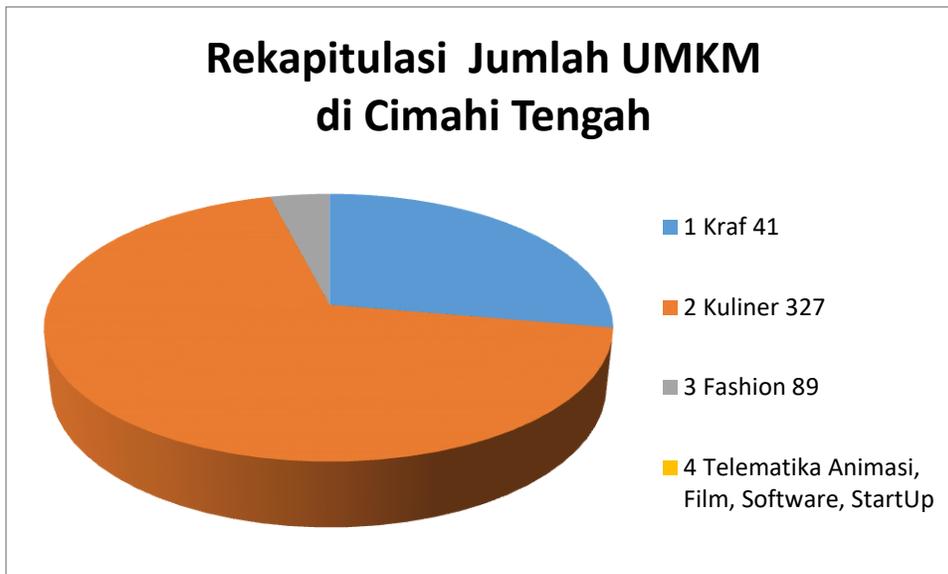
Jumlah UMKM yang prospektif lain adalah UMKM Kraf yang sangat bervariasi jenis kerajinan baik berbahan dasar logam, kayu, rotan, plastic dan kain perca dibandingkan UMKM Fashion yang memiliki jumlah Pelaku Usaha tidak terlalu berlimpah, tapi memiliki omzet yang cukup besar dibandingkan Kraf dan Atau logam.

Wilayah Cimahi Utara di dominasi oleh Kontur Berbukit dengan Jumlah

3.2. C. Profil UMKM di Wilayah Cimahi Tengah

Tabel UMKM Wilayah Cimahi Tengah

NO	JENIS PRODUK	JENIS DATA				NOTED
		Mikro	Kecil	Menengah	Besar	
1	Kraf	41	28	13	6	88
2	Kuliner	327	69	23	2	421
3	Fashion	89	4	5	7	105
4	Telematika	Animasi, Film, Software, StartUp				614



Dari Tabel diatas tampak bahwa UMKM di tingkat Mikro merupakan jumlah UMKM Mikro yang terbesar sebanyak 366 UMKM jika dibandingkan UMKM Kradf maupun Fashion, hampir 50% dari jenis UMKM lainnya, Melihat fenomena tersebut tampaknya hampir sebagian besar UMKM Jenis Kuliner Kota Cimahi khususnya di wilayah Cimahi Utara masih berada di tingkat bisnis di level Introduction.



Jumlah UMKM yang prospektif lain adalah UMKM Kraf yang sangat bervariasi jenis kerajinan baik berbahan dasar logam, kayu, rotan, plastic dan kain perca dibandingkan UMKM Fashion yang memiliki jumlah Pelaku Usaha tidak terlalu berlimpah, tapi memiliki omzet yang cukup besar dibandingkan Kraf dan Atau logam.

Wilayah Cimahi Utara di dominasi oleh Kontur Berbukit dengan Jumlah

Pengamatan dinamika UMKM berbagai Klaster dilakukan melalui mekanisme survey, jejak pendapat, wawancara secara random dan Melakukan FGD dan Koordinasi dengan Pemkot Cimahi bidang UKM dan Perdagangan.

Dari Pengamatan dan Hasil Survei Kecil diperoleh sebuah Gambaran Pola Operasional dan Kritical Point Pemberdayaan yang harus dilakukan antara lain :

1. Pengembangan Kapasitas Manajerial UMKM
2. Pengembangan Partisipasi UMKM
3. Penguatan Kelembagaan,
4. Standarisasi Produk dan HAKI
5. Fasilitasi Permodalan
6. Penguatan E Commerce untuk Akses Pasar Global

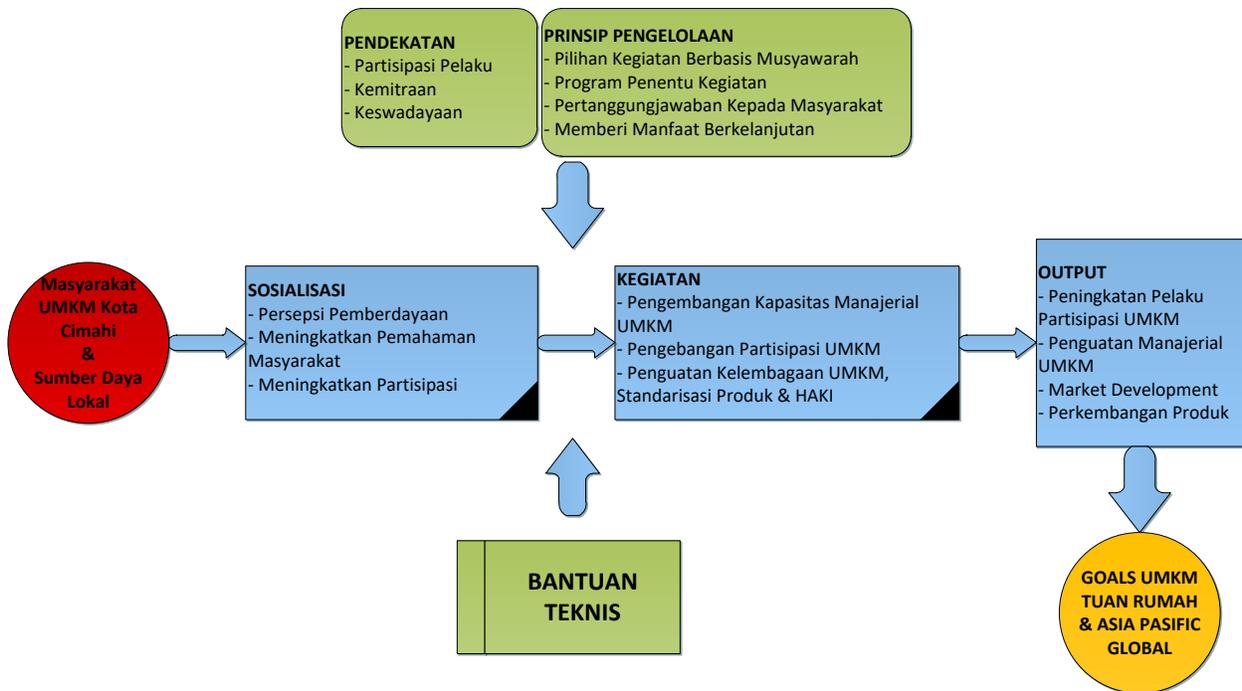
3.3. Gambaran Pembinaan UMKM Kota Cimahi

Pembinaan UMKM oleh Dinas UMKM dilakukan secara terintegrasi dengan melibatkan semua stakeholder terkait UMKM



BAB 4 MODEL PEMBERDAYAAN

4.1. Model Pemberdayaan Umum



Model Pemberdayaan di kota Cimahi menggunakan system terbuka dengan fungsi Input, proses dan output, dimana sistem input disini adalah Masyarakat dan Komunitas UMKM Kota Cimahi dan Sumber Daya lokal. Selanjutnya, system proses terdiri dari dua aktifitas strategis yaitu :

1. Sosialisasi :
 - a. Persepsi Pemberdayaan
 - b. Meningkatkan Pemahaman Masyarakat
 - c. Meningkatkan Partisipasi
2. Kegiatan Inti :
 - a. Pengembangan Kapasitas Manajerial UMKM
 - b. Pengembangan Partisipasi UMKM
 - c. Penguatan Kelembagaan UMKM, Standarisasi Produk & HAKI



NO	SISTEM	DETIL
1	Sistem Input	Komunitas UMKM Kota Cimahi
2	Proses	Sosialisasi : - Persepsi Pemberdayaan - Meningkatkan Pemahaman Masyarakat - Meningkatkan Partisipasi Kegiatan : - Pengembangan Kapasitas Manajerial UMKM - Pengembangan Partisipasi UMKM - Penguatan Kelembagaan - Standarisasi Produk/ Jasa - Akses Permodalan - E-Commerce
3	Pendekatan	Partisipasi Kemitraan Keswadayaan
4	Prinsip Pengelolaan	Pilihan Kegiatan Berbasis Musyawarah Program Penentu Kegiatan Pertanggungjawaban kepada Masyarakat Memberi Manfaat Berkelanjutan
5	Sistem Supporting	Bantuan Teknis : Teknologi Tepat Guna & Akses Permodalan
6	Sistem Output	Peningkatan Pelaku Bisnis UMKM Peningkatan Partisipasi Pelaku UMKM Peningkatan Managerial Skill Pelaku UMKM Market Development Product Development

Selanjutnya system output terdiri dari Peningkatan Pelaku Partisipasi UMKM, Penguatan Manajerial UMKM, Market Development dan Perkembangan.

Pendekatan Umum sudah dilakukan dan menjadi arah pengambilan kebijakana dalam pembinaan dan pemberdayaan

FACT FINDING – SETIAP KLASTER MEMBUTUHKAN MODEL PEMBERDAYAAN TEMATIK

Dari fakta temuan dilapangan diperoleh kondisi - kondisi sebagai berikut :

1. Setiap Klaster memiliki kekhasan dalam peta permasalahan dan pola pemberdayaan
2. Setiap Klaster memiliki Kritikal Aktiviti yang berbeda dan harus ditangani segera
3. Setiap Klaster Membutuhkan Pendampingan yang khas
4. Setiap Klaster Membutuhkan Pendekatan Pemberdayaan yang tidak sama
5. Setiap Klaster Memiliki situasi persaingan yang berbeda
6. Setiap Klaster Mempunyai Kebutuhan Penanganan Teknikal berbeda.

Dari konsep diatas tampaknya dibutuhkan sebuah pendekatan komprehensif tentang Model Pemberdayaan yang berdayaguna dan memberikan hasil optimal dalam proses pemberdayaan yang akan dilaksanakan pemerintan kota Cimahi.

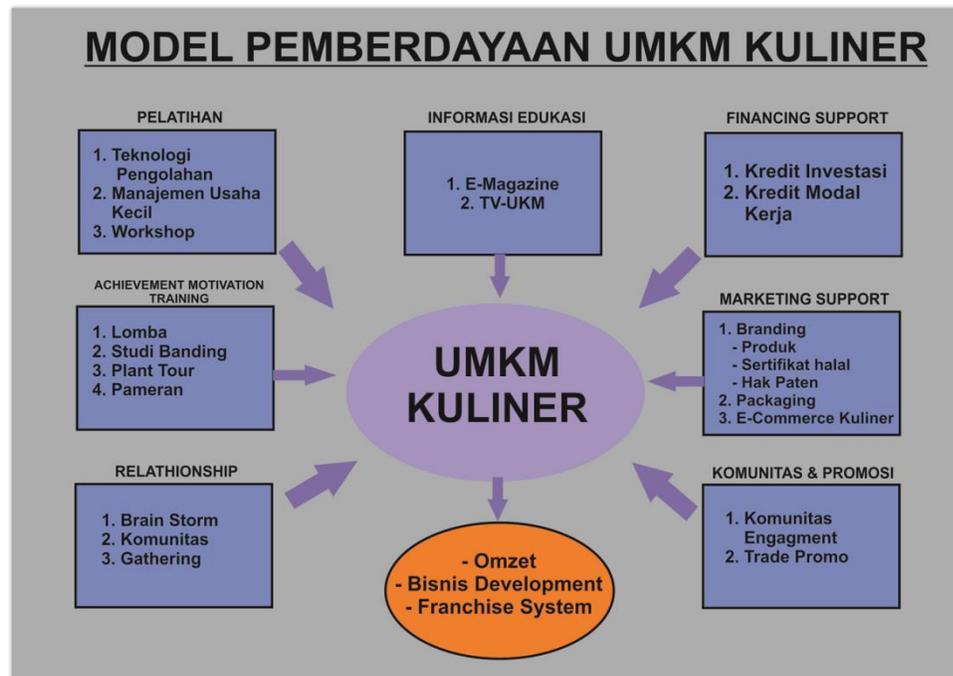
Berikut ini Beberapa Model Pemberdayaan yang mengarahkan proses pemberdayaan dan pendampingan sesuai dengan klaster UMKM :

1. Model Pemberdayaan UMK Klaster Kuliner



Pemberdayaan UMK Klaster Kuliner membutuhkan sebuah pendekatan yang terintegrasi dengan semua stakeholder dan pola supply chain di bisnis kuliner, memiliki jumlah UMKM yang terbesar di kota Cimahi dan mengalami pertumbuhan hampir 20% per tahun dibandingkan pertumbuhan jenis UMK dari klaster lainnya, dalam Sistem Pemberdayaan yang akan dilaksanakan terdapat 3 Fokus Pemberdayaan yang pertama, Aktivitas yang terkait dengan Advisori , kedua terkait dengan Pengembangan Kapasitas dan ketiga terkait dengan Sistem Reward dan Pengembangan.

Diagram 4. Model Pemberdayaan UMKM Kuliner



Sumber : Data yang diolah Konsultan : 2015

Implementasi Pola Pembinaan akan diarahkan pada peta permasalahan dan kondisi-kondisi khusus yang terkait dengan Situasi Persaingan Bisnis Kuliner, Kritisal Aktivitas yang berpotensi gagal nya UMK Kuliner di tahap Introduction atau Pertumbuhan.

Berikut ini adalah Matrix Kritisal Aktivitas dan Peta Permasalahan UMKM Kuliner

No	Detail	Keterangan
1	Kritisal Aktivitas	
	Tersedia bahan Baku	



	Standart Quality bahan Kandungan Bahan Izin Depkes Ke Halal an	
2	Peta Permasalahan	
	Permodalan Konsistensi Standart Kualitas Teknologi Pengolahan.	

Sumber : Data yang di olah Konsultan : 2015

2. Model Pemberdayaan Klaster Textile dan Fashion

Pemberdayaan UMK Klaster Textile & Fashion, membutuhkan sebuah pendekatan yang terintegrasi dengan semua stakeholder dan prioritas dalam penanganan kesempatan , memiliki jumlah UMKM yang terbesar di kota Cimahi dan mengalami pertumbuhan hampir 20% per tahun dibandingkan pertumbuhan jenis UMK dari klaster lainnya, dalam Sistem Pemberdayaan yang akan dilaksanakan terdapat 3 Fokus Pemberdayaan yang pertama, Aktivitas yang terkait dengan Advisori , kedua terkait dengan Pengembangan Kapasitas dan ketiga terkait dengan Sistem Reward dan Pengembangan.

Diagram 4. Model Pemberdayaan UMKM Fashion & Textile



Implementasi Pola Pembinaan akan diarahkan pada peta permasalahan dan kondisi-kondisi khusus yang terkait dengan Situasi Persaingan Bisnis Textile & Fashion, Kritis



Aktivitas yang berpotensi gagal nya UMK Textile & Fashion di tahap Introduction atau Pertumbuhan.

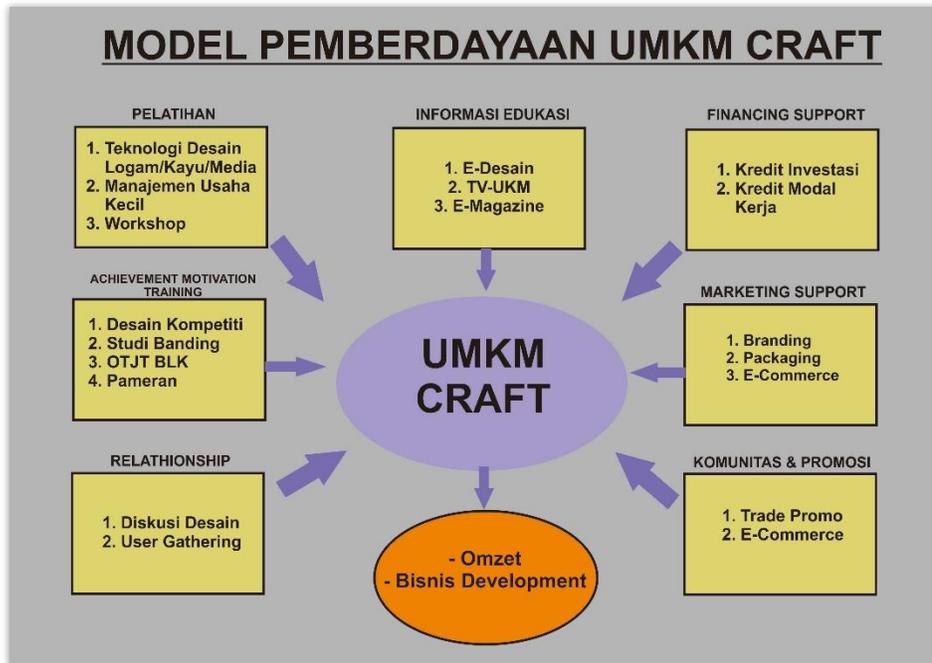
Berikut ini adalah Matrix Kritikal Aktivitas dan Peta Permasalahan UMKM Fashion & Textile

No	Detail	Keterangan
1	Kritikal Aktivitas	
	<ul style="list-style-type: none"> a. Tersedia bahan Baku b. Standart Quality bahan c. QC Pekerjaan d. Makloon e. Managing SDM 	
2	Peta Permasalahan	
	<ul style="list-style-type: none"> a. Permodalan b. Konsistensi Standart Kualitas c. Deadline Waktu Pengerjaan 	

3. Model Pemberdayaan UMKM Klaster Kerajinan

Pemberdayaan UMK Klaster Kerajinan, membutuhkan sebuah pendekatan yang terintegrasi dengan semua stakeholder dan prioritas dalam penanganan kesempatan , memiliki jumlah UMKM yang terbesar di kota Cimahi dan mengalami pertumbuhan hampir 20% per tahun dibandingkan pertumbuhan jenis UMK dari klaster lainnya, dalam Sistem Pemberdayaan yang akan dilaksanakan terdapat 3 Fokus Pemberdayaan yang pertama, Aktivitas yang terkait dengan Advisori , kedua terkait dengan Pengembangan Kapasitas dan ketiga terkait dengan Sistem Reward dan Pengembangan.

Diagram 4. Model Pemberdayaan UMKM Klaster Kerajinan



Implementasi Pola Pembinaan akan diarahkan pada peta permasalahan dan kondisi-kondisi khusus yang terkait dengan Situasi Persaingan Bisnis Kerajinan, Kritical Aktivitas yang berpotensi gagal nya UMK Kerajinan di tahap Introduction atau Pertumbuhan.

Berikut ini adalah Matrix Kritical Aktivitas dan Peta Permasalahan UMKM Kerajinan

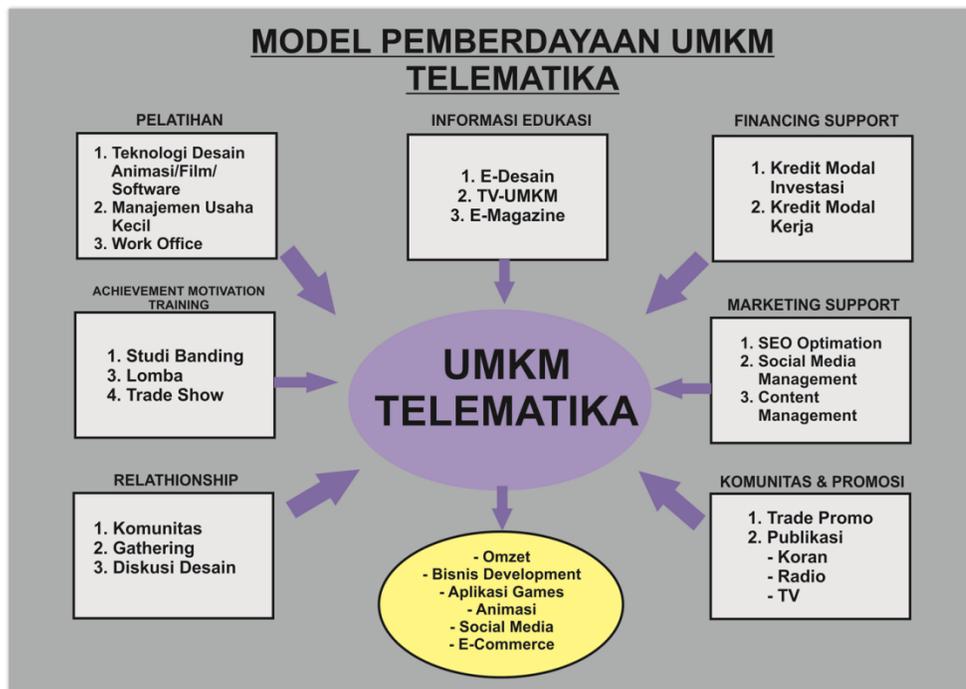
No	Detail	Keterangan
1	Kritical Aktivitas	
	Tersedia bahan Baku Standart Mutu bahan QC Pekerjaan Makloon Managing SDM	
2	Peta Permasalahan	
	Permodalan Konsistensi Standart Kualitas Deadline Waktu Pengerjaan Produk Serupa Pabrikasi Ketepatan Waktu Kirim Rejection	



4. Model Pemberdayaan Kluster Telematika

Pemberdayaan UMK Kluster Telematika, membutuhkan sebuah pendekatan yang terintegrasi dengan semua stakeholder dan prioritas dalam penanganan kesempatan, memiliki jumlah UMKM yang terkecil di kota Cimahi dan mengalami pertumbuhan kurang dari 10% per tahun dibandingkan pertumbuhan jenis UMK dari kluster lainnya, dalam Sistem Pemberdayaan yang akan dilaksanakan terdapat 3 Fokus Pemberdayaan yang pertama, Aktivitas yang terkait dengan Advisori, kedua terkait dengan Pengembangan Kapasitas dan ketiga terkait dengan Sistem Reward dan Pengembangan. Rata-rata Jenis UMK Telematika terdiri dari : StartUp Games Development, Social Media, Aplikasi Bisnis dan Konten Khusus,

Diagram 4. Model Pemberdayaan UMKM Kluster Telematika



Implementasi Pola Pembinaan akan diarahkan pada peta permasalahan dan kondisi-kondisi khusus yang terkait dengan Situasi Persaingan Bisnis Telematika, Kritisal Aktivitas yang berpotensi gagal nya UMK Telematika di tahap Introduction atau Pertumbuhan.

Berikut ini adalah Matrix Kritisal Aktivitas dan Peta Permasalahan UMKM Telematika



No	Detail	Keterangan
1	Kritikal Aktivitas	
	<ul style="list-style-type: none"> a. Target Pasar b. Produk/ Services c. Content Management d. Security e. Managing SDM 	
2	Peta Permasalahan	
	<ul style="list-style-type: none"> f. Permodalan g. Konsistensi Standart Kualitas h. Deadline Waktu Pengerjaan i. Komplain User j. Proses Bisnis 	

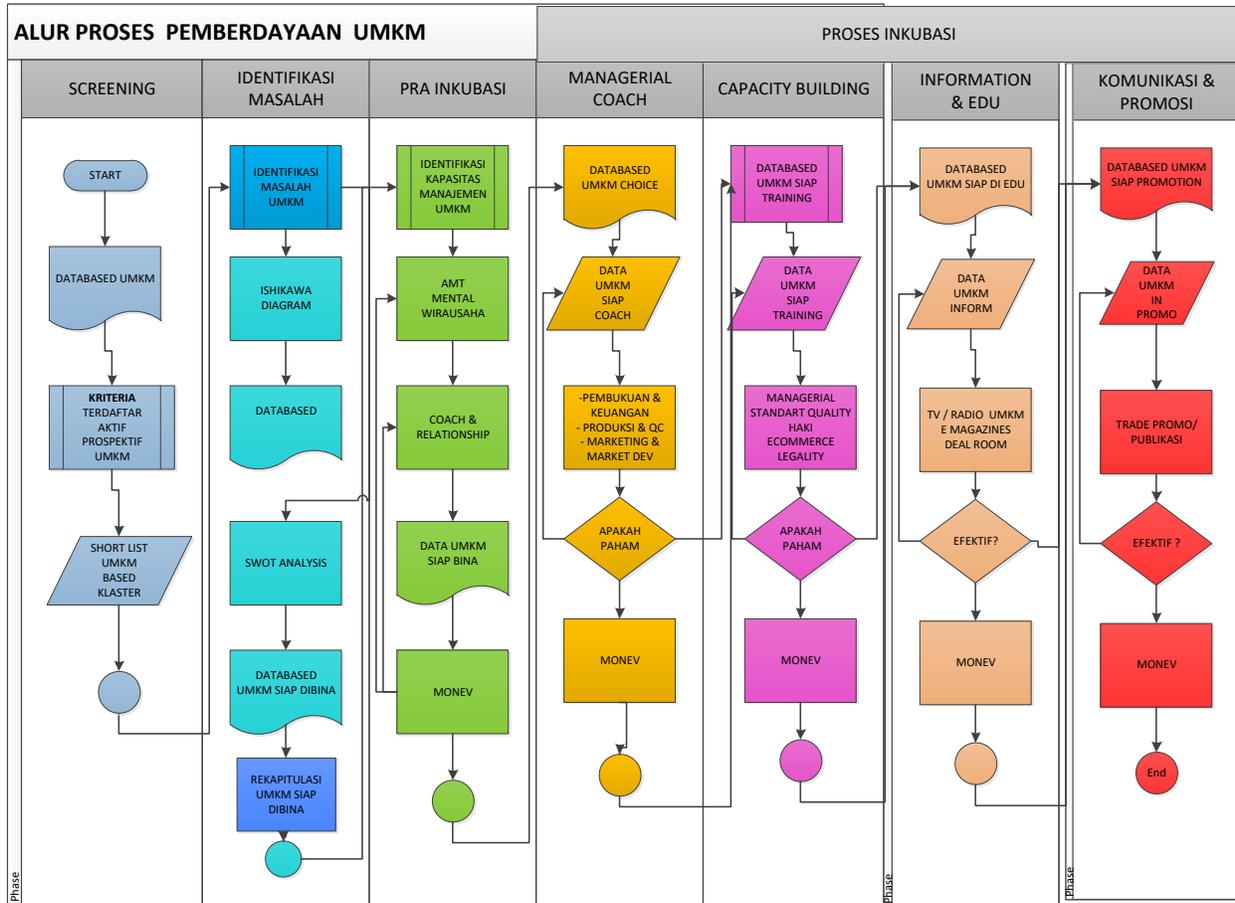
BAB 5

SISTEM OPERASIONAL PROSEDUR PEMBERDAYAAN UMKM DI KOTA CIMAH

5.1. Alur Proses Pemberdayaan UMKM

Berikut ini adalah gambar bagaimana proses pemberdayaan UMKM yang akan berjalan di Kota Cimahi, berikut ini gambaran Alur Proses yang sedang berlangsung :

Gambar 5.1.



Dari gambar diatas proses pemberdayaan akan berlangsung melalui tahapan- tahapan sebagai berikut :

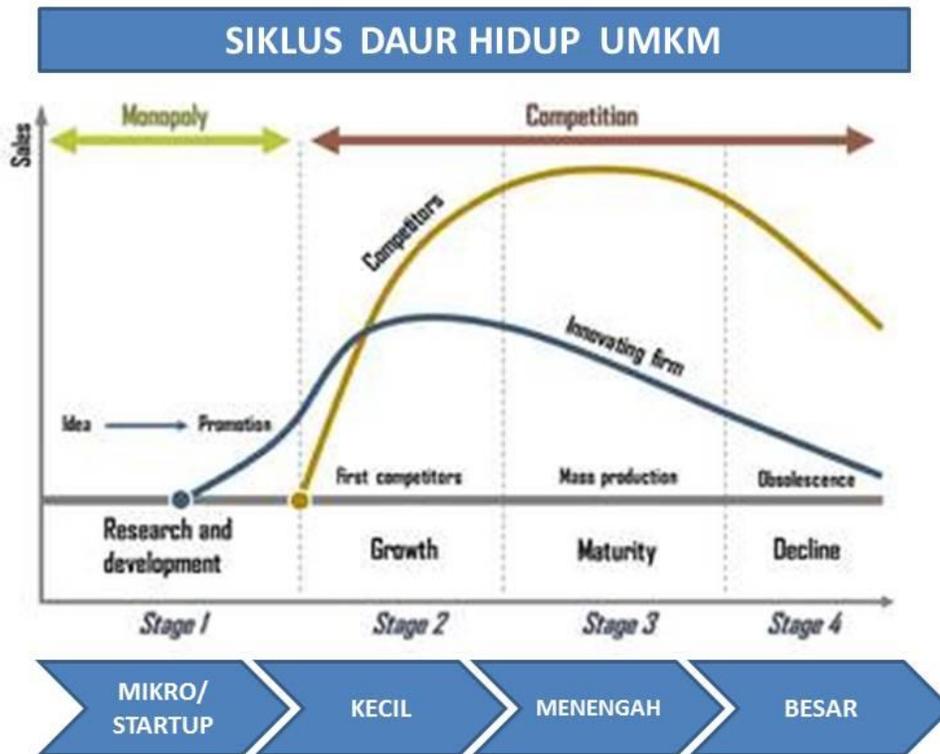
No	Aktivitas	Definisi	Stakeholder	Waktu
1	Screening	Proses filterisasi/ pemilihan umkm yang dapat mengikuti program Pemberdayaan dengan Penetapan Kriteria Khusus	PIC Pemkot – Bidang UMKM	1 Minggu
2	Identifikasi Masalah	Proses Identifikasi Kekuatan dan Kelemahan UMKM dengan Tools SWOT Analysis dan Mengidentifikasi Akar Masalah UMKM dengan Mnggunakan Tools Ishikawa Diagram	Fasilitator UMKM dan Konsultan	1 Minggu
3	Proses Pra Inkubasi Bisnis	Proses Inkubasi dan Persiapan Coaching meneliti level dan kapasitas Pembinaan	Idem	4 Minggu



		UMKM dengan melakukan 2 aktivitas utama yaitu Achievement Motivation Training dan Persiapan Coach Business		
	Proses Inkubasi			
4	Managerial Coach	Proses Coaching dan Pendampingan Managerial dan Manajemen Usaha Kecil meliputi Aspek Keuangan dan Akuntansi Pembukuan, Aspek Produksi dan Differensiasi Produk, Pemasaran dan Market Development, Packaging, Pricing, SDM dan Sistem operasional	Idem	12 Minggu
5	Capacity Building dan Bantuan Teknis	Proses Peningkatan Kapasitas Pelaku UMKM dengan memfokuskan pada : Manajerial, Standart Quality, HAKI, E- Commerce, Legalitas dan Akses Permodalan.	Fasilitator UMKM, Pemkot dan Konsultan	3 Minggu
6	Information dan Education	Proses Disseminasi dan Edukasi UMKM saling bertukar informasi dan Memberi Positif Campagin melalui TV UMKM dan E- Magazines	Idem	4 Minggu
7	Komunikasi dan Promosi	Proses Komunikasi dan Promosi UMKM Kota Cimahi ke Market Global dan Market Lokal : Dalam Bentuk Roadshow dan TradeShow	Idem	4 Minggu

Sumber : Data yang Diolah 2015

Proses Pemberdayaan dilakukan secara parallel untuk jenis UMKM baik Mikro, Kecil dan Menengah, kebutuhan akan pembinaan dirasakan oleh UMKM terutama untuk UMKM Mikro, Kecil dan Menengah, jika digambarkan dalam diagram daur hidup atau Business Lifecycle dapat di kategorikan sebagai berikut :



1. Masa Introduction , dilevel ini dinamikanya adalah bertahan hidup dan Optimalisasi Target Omzet menjadi fokus UMKM untuk jenis Mikro (Start-Up) untuk mencapai sustaining order harus membangun mental dan jiwa yang kuat, Alokasi Biaya Operasional dan Pemasaran harus direncanakan dengan tepat >>>> UMKM Mikro
2. Masa Growing Up , dilevel ini target pasar sudah menampakkan kemajuan dan omzet mulai sustaining seiring dengan meningkatnya jumlah pelanggan, Biaya Operasional harus dipertimbangkan secara bijaksana >>>> UMKM Kecil
3. Masa Maturity, dilevel ini perusahaan berada posisi puncak menikmati semua jerih payah namun harus waspada untuk terus melakukan inovasi dan pengembangan produk dan meningkatkan layanan >>>>> UMKM Menengah

Jika melihat Alur Proses Pemberdayaan maka setiap jenis UMKM dapat mengikuti proses pemberdayaan dengan mengikuti ketentuan yang berlaku antara lain :

1. Mendaftar Program Pemberdayaan UMKM
2. Masa Berwirausaha : Sudah terdaftar sejak 2 tahun lalu
3. Aktif dalam setiap Program Pembinaan yang diberikan oleh Pemkot
4. Terdaftar secara informal/ Formal dalam Group UMKM Kota Cimahi
5. Memiliki Prospek Produk yang baik di Pasaran



5.2. Sistem Otorisasi Proses Pemberdayaan UMKM

5.2.1. SOP PROSES SCREENING UMKM

 CIMAH DINAS UMKM KOTA CIMAH	Nomor SOP	
	Tgl Pembuatan	
	Tgl Pengesahan	
	Disahkan Oleh	
	Nama SOP	SOP Screening UMKM
Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksanaan	
<ul style="list-style-type: none"> •UU No.20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah •UU No. 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil •PP No. 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan •PP No. 32 Tahun 1998 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil •Inpres No. 10 Tahun 1999 tentang Pemberdayaan Usaha Menengah 		
Keterkaitan	Dokumen Pelengkap	
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Formulir 1.1. Pendaftaran Program Pemberdayaan UMKM 2. Databased UMKM Kota Cimahi 	
Peringatan	Peralatan dan Perlengkapan	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Jika Prosedur tidak dilaksanakan fasilitasi Sosialisasi tidak dapat dilaksanakan 2. Diperlukan Koordinasi dengan seluruh stakeholderterkait 3. Pelaksanaan Teknis Screening Data memerlukan perencanaan dan persiapan 		



5.2.1. A. SOP PROSES SCREENING UMKM

NO	AKTIVITAS	PIC	MUTU BAKU		
			Dokumen Pelengkap	Output	Hari
1	Penyiapan Database UMKM	Pemkot Cimahi	Dokumen Databased		1
2	Penetapan Kriteria UMKM	Idem	Short List Kriteria		1
3	Proses Screening berdasarkan kriteria	idem	Dokumen Tabulasi	BA Proses Penerimaan	5
4	Penetapan Berita Acara Hasil Screening	idem			2
5	Penetapan Shortlist UMKM Lulus Screening	Pemkot & Fasilitator		BA Shortlist UMKM Lulus	2



5.2.2. SOP PROSES IDENTIFIKASI MASALAH UMKM

 DINAS UMKM KOTA CIMAHI	Nomor SOP	
	Tgl Pembuatan	
	Tgl Pengesahan	
	Disahkan Oleh	
	Nama SOP	SOP Screening UMKM
Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksanaan	
<ul style="list-style-type: none"> •UU No.20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah •UU No. 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil •PP No. 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan •PP No. 32 Tahun 1998 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil •Inpres No. 10 Tahun 1999 tentang Pemberdayaan Usaha Menengah 	1. Urgent Dilakukan	
Keterkaitan	Dokumen Pelengkap	
	3. Formulir 1.1. Pendaftaran Program Pemberdayaan UMKM 4. Databased UMKM Kota Cimahi 5. Diagram Ishikawa 6. Formulir 03	
Peringatan	Peralatan dan Perlengkapan	
	1.	

1.2.2. A. Prosedur Proses Identifikasi Masalah

NO	AKTIVITAS	PIC	MUTU BAKU		
			Dokumen Pelengkap	Output	Hari
1	Penyiapan Dokumen UMKM Shortlist Lulus Screening	Pemkot Cimahi	Dokumen Databased		2
2	Identifikasi Strength - Weaknes UMKM Per Klaster	Fasilitator	Matrix SWOT Analysis	Dokumen IFAS & EFAS	2
3	Identifikasi Root Cause Analysis / Akar Masalah	Fasilitator	Diagram Ishikawa	Dokumen Ishikawa	2
4	Membuat Rekapitulasi tentang Kondisi UMKM dan Diagnosa Masalah	Fasilitator	Formulir 03 Rekapitulasi UMKM		2
5	Dokumen Rekapitulasi	Fasilitator		Berita Acara Rekapitulasi	2



5.2.3. SOP PROSES PRA INKUBASI BISNIS

 DINAS UMKM KOTA CIMAHI	Nomor SOP	
	Tgl Pembuatan	
	Tgl Pengesahan	
	Disahkan Oleh	
	Nama SOP	SOP Screening UMKM
Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksanaan	
<ul style="list-style-type: none"> •UU No.20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah •UU No. 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil •PP No. 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan •PP No. 32 Tahun 1998 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil •Inpres No. 10 Tahun 1999 tentang Pemberdayaan Usaha Menengah 	Urgent Dilakukan	
Keterkaitan	Dokumen Pelengkap	
	Formulir 04 Proses Coaching Bisnis Formulir 05 Proses Konseling Bisnis	
Peringatan	Peralatan dan Perlengkapan	
	2.	

5.2.2. A. Prosedur Proses Pra Inkubasi Bisnis

NO	AKTIVITAS	PIC	MUTU BAKU		
			Dokumen Pelengkap	Output	Hari
1	Identifikasi Kapasitas Manajemen UMKM	Fasilitator	Dokumen Databased Kuestioner Wirausaha	Review Manajemen Kapasitas	2
2	Melaksanakan Achievement Motivation Training	Konsultan & Fasilitator	Materi AMT	Review Individu dan Kapasitas	2
3	Melaksanakan Coach Proses Bisnis	Idem	Formulir 04		2
4	Melaksanakan Konseling Bisnis/ Klinik Bisnis	Idem	Formulir 05		2
5	Rakapitulasi UMKM Siap Proses Lanjut			Berita Acara Rakapitulasi	2



5.2.3. SOP PROSES MANAGERIAL COACH

 DINAS UMKM KOTA CIMAHI	Nomor SOP	
	Tgl Pembuatan	
	Tgl Pengesahan	
	Disahkan Oleh	
	Nama SOP	SOP Screening UMKM
Dasar Hukum		Kualifikasi Pelaksanaan
<ul style="list-style-type: none"> •UU No.20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah •UU No. 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil •PP No. 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan •PP No. 32 Tahun 1998 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil •Inpres No. 10 Tahun 1999 tentang Pemberdayaan Usaha Menengah 		Urgent Dilakukan
Keterkaitan		Dokumen Pelengkap
		Lembar Review Berita Acara Coaching Materi Coaching
Peringatan		Peralatan dan Perlengkapan

5.2.3. A. PROSEDUR PROSES MANAGERIAL COACH

NO	AKTIVITAS	PIC	MUTU BAKU		
			Dokumen Pelengkap	Output	Hari
1	Review Dokumen Identifikasi UMKM dan Kapasitas Manajemen UMKM	Fasilitator	Dokumen Databased Kuestioner Wirausaha	Review Manajemen Kapasitas	2
2	Review Aspek Pasar & Pemasaran & Pengembangan Pasar	Konsultan & Fasilitator	Materi Coach Pasar & Pemasaran	Berita Acara Coaching	2
3	Review Aspek Produksi & operasional	Idem	Materi Coach Operasional	Berita Acara Coaching	2
4	Review Pembukuan, Transaksi dan Keuangan	idem	Materi Coach Transaksi Keuangan dan Pembukuan	Idem	2
5	Review Sistem Informasi dan Promosi	Idem	Materi Coach Sistem Informasi/ Promosi	Idem	2
6	Review Legalitas Usaha dan HAKI	idem	Materi Coach HAKI	Idem	

5.2.3. SOP PROSES CAPACITY BUILDING DAN BANTUAN TEKNIS



	Tgl Pembuatan	
	Tgl Pengesahan	
	Disahkan Oleh	
	Nama SOP	SOP Screening UMKM
Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksanaan	
<ul style="list-style-type: none"> •UU No.20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah •UU No. 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil •PP No. 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan •PP No. 32 Tahun 1998 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil •Inpres No. 10 Tahun 1999 tentang Pemberdayaan Usaha Menengah 	Urgent Dilaksanakan	
	Nomor SOP	
	Tgl Pembuatan	
Ket	Dokumen Pelengkap	
	Materi Pelatihan	
	Disahkan Oleh	
	Pre Test	
	Post Test	
	Berita Acara Kegiatan	
Peringatan	Peralatan dan Perlengkapan	
	Raungan	
	Training Kit	
	OHP	
	White Board	

5.2.4. A. PROSEDUR PROSES CAPACITY BUILDING DAN BANTUAN TEKNIS

NO	AKTIVITAS	PIC	MUTU BAKU		
			Dokumen Pelengkap	Output	Hari
1	Review Kapasitas Manajemen UMKM Siap Latih	Fasilitator	Dokumen Databased	Review Manajemen Kapasitas	2
2	Workshop Go Global – E Commerce Klinik	Konsultan/ Fasilitator	Materi Pelatihan	Berita Acara Pelatihan	2
3	Pelatihan Design Packaging	Idem	Materi Pelatihan	Idem	2
4	Pelatihan Produk Inovasi	Idem	Materi Pelatihan	Idem	2
5	Workshop HAKI	Idem	Idem	Idem	2
6	Pelatihan Berbasis Klaster (Kuliner/ Fashion / Kraf / Telematika	Idem	Idem	Idem	2
7	Pelatihan Desain Produk	Idem	Idem	Idem	2
8	Pelatihan Legalitas dan Sertifikasi	idem	Idem	Idem	2
9	Bantuan Teknis Free HAKI	Idem	Idem	Idem	2
10	Bantuan Teknis Pendaftaran Gratis IPRT	Idem	idem	Idem	2

5.2.3. SOP PROSES PENGEBANGAN INFORMATION & EDUCATION



	Nama SOP	SOP Screening UMKM
Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksanaan	
<ul style="list-style-type: none"> •UU No.20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah •UU No. 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil •PP No. 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan •PP No. 32 Tahun 1998 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil 	Urgent Dilakukan	
<ul style="list-style-type: none"> •Inpres No. 10 Tahun 1999 tentang Pemberdayaan Usaha Menengah 	Nomor SOP	
	Tgl Pembuatan	
	Dokumen Pelengkap	
Ke	Disahkan Oleh	
	Nama SOP	SOP Screening UMKM
Per	Peralatan dan Perlengkapan	
	Kamera SLR	
Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksanaan	
•UU No.20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah	Urgent Dilakukan	
	Software Multimedia	

5.2.5. A. PROSEDUR PROSES PENGEMBANGAN INFORMASI & EDUKASI

NO	AKTIVITAS	PIC	MUTU BAKU		
			Dokumen Pelengkap	Output	Hari
1	Record Kinerja UMKM Based Klaster	Fasilitator			1
2	Liputan TV Bisnis UKM Kraf	Konsultan & Fasilitator	Dokumentasi	Performance UMKM Terdesiminasi	2
3	Liputan TV Bisnis UKM Kuliner	Idem	Dokumentasi	Idem	2
4	Liputan TV Bisnis UKM Fashion	idem	Dokumentasi	Idem	2
5	Liputan TV Bisnis UKM Telematika	Idem	Idem	Idem	2
6	E Magazines Edisi 1 sd 3	Idem	Idem	Idem	6
7	E Design Graphis	Idem	Idem	idem	3
8	Belajar bikin website	idem	idem	idem	3

5.2.3. SOP PROSES PENGEMBANGAN KOMUNIKASI DAN PROMOSI



<ul style="list-style-type: none"> •UU No. 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil •PP No. 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan •PP No. 32 Tahun 1998 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil •Inpres No. 10 Tahun 1999 tentang Pemberdayaan Usaha Menengah 	
Keterkaitan	Dokumen Pelengkap
	Formulir 04 Proses Coaching Bisnis Formulir 05 Proses Konseling Bisnis
Peringatan	Peralatan dan Perlengkapan
	3.

5.2.6. A. PROSEDUR PROSES PENGEMBANGAN KOMUNIKASI DAN PROMOSI

NO	AKTIVITAS	PIC	MUTU BAKU		
			Dokumen Pelengkap	Output	Hari
1	Record Kinerja UMKM Based Klaster	Fasilitator	Rekap Laporan UMKM		2
2	Temu Bisnis Meet Up & Greet Komunitas Bisnis	Konsultan & Fasilitator	Skedul Event	Kontrak Penjualan	2
3	Tradeshaw UMKM	Idem	Skedul Event	Idem	2
4	TradeShow Asia Afrika	idem	Idem	Idem	2
5	E Commerce Kraf	Idem	Idem	Idem	2
6	E Commerce Kuliner	Idem	Idem	Idem	
7	E Commerce Fashion	idem	idem	Idem	



 CIMAHU DINAS UMKM KOTA CIMAHU	Nomor SOP	
	Tgl Pembuatan	
	Tgl Pengesahan	
	Disahkan Oleh	
	Nama SOP	SOP Screening UMKM
Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksanaan	
•UU No.20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah	Urgent Dilakukan	

5.2.3. SOP PROSES MONITORING DAN EVALUASI



<ul style="list-style-type: none"> •UU No. 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil •PP No. 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan •PP No. 32 Tahun 1998 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil •Inpres No. 10 Tahun 1999 tentang Pemberdayaan Usaha Menengah 	
Keterkaitan	Dokumen Pelengkap
	Formulir 06 Lembar Monev Capacity Building dan BAntuan Teknis Formulir 07 Lembar Monev SOP Pengembangan Formulir 08 Lembar Monev
Peringatan	Peralatan dan Perlengkapan
	4.

5.2.7. A. PROSEDUR PROSES MONITORING DAN EVALUASI

NO	AKTIVITAS	PIC	MUTU BAKU		
			Dokumen Pelengkap	Output	Hari
1	Record Kinerja UMKM Based Klaster	Fasilitator	Rekap Laporan UMKM		2
2	Monitoring Evaluasi 1	Konsultan & Fasilitator	Lembar Monitoring 1	Kontrak Penjualan	2
3	Monitoring Evauasi 2	Idem	Lembar Monitoring 2	Idem	2
4	Monitoring Evaluasi 3	idem	Idem	Idem	2
5	Monitoring Evaluasi 4	Idem	Idem	Idem	2
6	Monitoring Evaluasi 5	Idem	Idem	Idem	
7		idem		Idem	



BAB 6

SISTEM MONITORING DAN EVALUASI

6.1. Pendahuluan

Monitoring dan Evaluasi yang Efektif (1) Monitoring dan evaluasi tidak sama, tetapi keduanya memerlukan berbagai unsur dan alat yang sama, antara lain adanya sasaran-sasaran program yang jelas, target dan indikator, serta basis data yang mengandung data mutakhir (2) Sasaran (output, outcome, impact) perlu ditetapkan sejak awal (pada saat perencanaan), begitu pula dengan indikator dan sasaran utama. (3) Monitoring dapat mempermudah kita dalam mengamati terus-menerus trend dan masalah, dan bila perlu melakukan penyesuaian dalam rencana implementasi atau proses pengelolaan secara tepat waktu. (4) Bila dikaitkan dengan sistem monitoring yang kokoh, evaluasi tidak hanya dapat mengidentifikasi hasil-hasil program, tetapi juga dapat menyediakan informasi mengenai kapan, mengapa, dan bagaimana implementasi program meleset dari rencana semula dan kemudian menyajikan rekomendasi untuk mengatasi masalah itu monitoring dan evaluasi dapat dipakai mengidentifikasi dan mengatasi masalah. (5) Monitoring dan evaluasi juga penting dalam upaya untuk merekam temuan, inovasi, hasil, dan praktik baik, untuk disebarluaskan serta dimanfaatkan pihak dan daerah lain dan juga sebagai dasar untuk “merayakan” keberhasilan. Selain itu, monitoring dan evaluasi merupakan wahana peran serta penerima manfaat program/kegiatan yang sangat efektif bila dilakukan dengan benar.

10 Langkah Monitoring dan Evaluasi Fungsi Monitoring Evaluasi manajemen Pengendalian peran organisasi Sumber: Bank Dunia (2004)

Kerangka Monitoring dan Evaluasi Monitoring berfokus pada penelusuran dan pelaporan mengenai masukan, kegiatan, dan terutama keluaran. Evaluasi lebih berfokus pada keluaran serta terutama hasil/manfaat dan juga dampak (impacts).

Sekilas Persamaan dan Perbedaan Monitoring dan Evaluasi Perbedaan *) Aspek *) Persamaan *) Monitoring Evaluasi Waktu post project (mid-project if Dalam 1 tahun anggaran on-going project berjalan needed to be continued) Pelaku Unit kerja internal Unit Kerja eksternal Dilaporkan kepada atasan langsung selaku KPA Level Substansi Kegiatan Program (agregat kegiatan) Dalam satu DIPA Perbaikan mekanisme Kegunaan Perbaikan kebijakan Maximasi efisiensi dan proyek efektivitas Sifat laporan Rekomendasi kebijakan Memperbaiki perencanaan dan Progress report penganggaran program Level Indikator Indikator output Indikator outcome / impact Harus mudah diukur Ordinal deskriptif Skala Indikator Rasio Harus terukur, ada baseline Interval kuantitatif Teknik deskriptif Metode ukur Teknik analitik Metode ilmiah Sensus Alat ukur Survei, Sensus Sesuai kebutuhan *) Akan dijelaskan bertahap makna dan manfaatnya.

6.2. Pemahaman Tentang Monitoring

Definisi dan Konsep Dasar Monitoring Merupakan fungsi manajemen yang dilakukan pada saat suatu kegiatan sedang berlangsung apabila dilakukan oleh pimpinan maka mengandung fungsi pengendalian. Mencakup antara lain: (a) penelusuran pelaksanaan kegiatan dan keluarannya

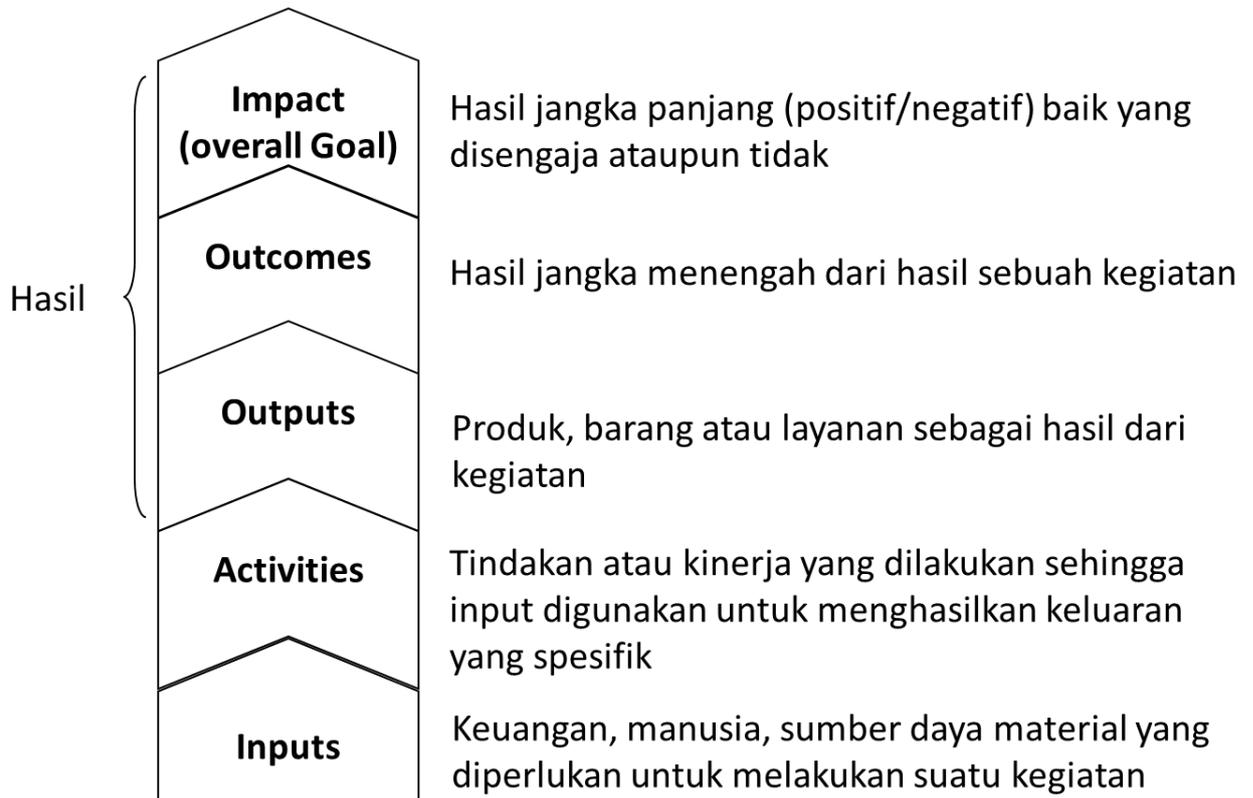


(outputs) (b) pelaporan tentang kemajuan (c) identifikasi masalah-masalah pengelolaan dan pelaksanaan. Sebagai contoh: Untuk setiap program pembangunan, monitoring dapat berupa pelaporan setiap enam bulan tentang kegiatan yang telah dilakukan dan/atau keluaran (outputs) yang telah dicapai dalam hal seperti imunisasi, perbaikan sekolah, pengadaan sistem air bersih.

Rencana Monitoring (1) Rencana monitoring sebaiknya mencakup langkah-langkah sebagai berikut:

- Langkah 1: Tentukan kegiatan dan keluaran utama yang harus dimonitor Untuk sektor kesehatan, misalnya, monitoring dapat difokuskan pada hal-hal seperti prasarana yang telah ditingkatkan, di mana peningkatan prasarana itu dilakukan, klien mana saja yang menerima pelayanan dan untuk apa, dan/atau obat gratis apa yang telah disediakan, untuk siapa dan untuk penyakit apa saja. Yang perlu kita ingat adalah jangan berusaha untuk memonitor segala aspek. Yang penting, kita memonitor apa yang telah dilakukan, keluaran apa yang dihasilkan, di mana, kapan, oleh siapa, dan untuk siapa. Kemudian, hasil monitoring itu dibandingkan dengan rencana semula, selisih antara rencana dan hasil monitoring dibuat laporannya, dan kemudian sejauh mungkin faktor-faktor penyebab perbedaan itu diidentifikasi. Tata cara penyimpanan data juga penting untuk mempermudah penyusunan laporan yang akurat dan tepat waktu. Sedapat mungkin sumber data yang telah dikumpulkan secara rutin dimanfaatkan. Ciptakan format pelaporan yang tidak terlalu rumit, dengan sebagian hasilnya disajikan secara visual/grafik.
- Rencana Monitoring (2) Langkah 2: Tentukan pihak mana yang akan melakukan monitoring, dan kapan. Sebaiknya pihak yang melakukan monitoring yang dimaksud di sini bukan pihak pengelola program langsung, untuk menjaga independensi. Dengan menganut asas partisipatif, wakil-wakil penerima manfaat program/kegiatan sedapat mungkin bersama-sama melakukan monitoring. Mengenai frekuensi, hal ini sebaiknya dilakukan paling tidak setiap enam bulan sekali untuk sebuah program jangka menengah atau jangka panjang.
- Rencana Monitoring (3) Langkah 3: Tentukan siapa saja yang akan menerima laporan hasil monitoring. Sebaiknya laporan hasil monitoring disebarkan tidak hanya pada pihak-pihak pemerintah (eksekutif dan legislatif), tetapi juga pada pihak pelaksana (misalnya: rumah sakit, kontraktor), instansi pemerintah pusat serta wakil-wakil kelompok penerima manfaat, dan juga OMS untuk meminta umpan balik. Buatlah pertemuan berkala untuk meninjau kembali tingkat kemajuan serta memutuskan apakah rencana implementasi perlu disesuaikan.

Model Monitoring Evaluasi yang umum dilakukan :



6.3. Pemahaman Tentang Evaluasi

Definisi dan Konsep Dasar Evaluasi Merupakan fungsi manajemen yang dilakukan setelah kurun waktu tertentu atau setelah suatu kegiatan telah berlalu. Mencakup antara lain: (a) Penilaian atas dampak kolektif—baik positif maupun negatif—dari semua (atau sebagian besar) kegiatan yang telah dilakukan, pada lokasi dan/atau kelompok sasaran yang berbeda-beda. (b) Deskripsi keluaran dan hasil/manfaat sebagaimana dilihat dari sudut pandang penerima manfaat. Mengenai kegiatan yang disebut di atas. Misalnya, evaluasi dapat dilakukan terhadap jumlah balita yang telah diimunisasi serta tingkat penurunan angka penyakit yang disebabkan oleh program imunisasi tersebut. Contoh lain, sejauh mana perbaikan sekolah mengakibatkan peningkatan kehadiran anak di sekolah dan pengurangan jumlah anak usia sekolah yang putus sekolah, dan sejauh mana frekuensi penyakit yang menular lewat air berkurang akibat pengadaan sistem air bersih.

Jenis Evaluasi Tergantung keperluan dilakukan pada titik-titik berbeda dalam siklus program/proyek. Ada evaluasi proses yang berfokus pada mutu penyampaian pelayanan, ada evaluasi biaya-manfaat dan ada evaluasi dampak. Evaluasi formatif dilakukan pada waktu program/kegiatan berjalan dengan tujuan untuk memperbaiki pelaksanaan, sedangkan evaluasi sumatif dilakukan pada saat program/kegiatan sudah berakhir, dengan tujuan untuk mengukur dampak serta menghimpun pelajaran/pengalaman yang berguna. Terdapat dua jenis evaluasi yang perlu kita pertimbangkan: (1) Evaluasi atas Proses. (2) Evaluasi Dampak.

Evaluasi atas Proses Jenis evaluasi ini berfokus pada apa yang telah dilakukan, bagaimana melakukannya, siapa yang menjadi penerima manfaat, serta apa respons mereka terhadap kegiatan program. Contoh: Untuk program peningkatan pelayanan pendidikan, sekolah mana yang ikut serta, kegiatan apa yang telah dilakukan oleh sekolah itu, dan sejauh mana murid telah menerima manfaat dibandingkan jumlah anak usia sekolah keseluruhan? Jenis evaluasi ini didasarkan pada laporan-



laporan monitoring dan penelaahan atas dokumendokumen program, wawancara, serta kunjungan lapangan. Jenis evaluasi ini relatif lebih mudah dilakukan dan sangat berguna bila laporan monitoring atau umpan balik dari lapangan menunjukkan bahwa terjadi keterlambatan, pengeluaran biaya yang melampaui anggaran, dan ada keluhan dari penerima manfaat atau persoalan dalam pengelolaan program.

Model Evaluasi yang umum dipake untuk Proses Evaluasi

The Logframe Matrix

Logframe hierarcy	Performance indicators	Means of verification	Assumption and risk
Goal Higher objective to which this operation, along with other , is intended to contribute	Impact Indicators (increasingly standardised) to measure programe performance	The program evaluation system	(Goal-to-Super-Goal) Risk regarding strategic impact
Purposes The outcomes of an operation. The change in beneficiary behaviour, system or institutional performance because of the combined output strategy and key assumptions	Outcomes Measures that describe the accomplishment of the purpose. The value, benefit, and return on investment.	People, event, processes, sources of data for organising the opration's evaluation system.	(Purpose-to-Goal) Risk regarding programme level impact
Outputs The actual deliverables. What the operation can be held accountable for producing	Outputs indicators that measure the goods and services finally delivered by the operation	People, event, processes, sources of data – supervision and monitoring system for validating the operation's design	(Output-to-Purpose) Risk regarding design effectiveness
Activities The main activity clusters that must be undertaken in order to accomplish the outputs	Input/Resources Budget by activity. Monetary, physical & human resources required to produce the outputs	People, event, processes, sources of data – supervision and monitoring system for validating implementation progress	(Activity-to-Output) Risk regarding implementation & efficiency

Evaluasi Dampak Jenis evaluasi ini berusaha mengungkapkan siapa sebenarnya yang memperoleh manfaat dari program dan berapa besar manfaatnya; dengan kata lain, sejauh mana hasil/manfaat (dan dampak) yang diharapkan telah tercapai. Contoh: pada program peningkatan pelayanan pendidikan, kita tidak hanya melaporkan apa yang telah dilakukan dan berapa murid yang terlibat, tetapi juga sejauh mana mereka memperoleh pendidikan gratis dan pendidikan yang lebih bermutu, bersekolah lebih lama, serta sejauh mana hasil pendidikan mereka lebih baik dibandingkan dengan murid yang bersekolah di sekolah yang tidak mempunyai program peningkatan pelayanan pendidikan.

Jenis evaluasi ini bisa saja cukup mahal bila kelompok sasaran besar sekali atau bila kita harus membuat perbandingan dengan, misalnya, kelompok-kelompok masyarakat di luar program. Yang jelas, kita harus merancang evaluasi sesuai dengan sumber daya yang kita miliki, dengan misalnya menggunakan sampel responden yang memadai jumlahnya untuk mengetahui sejauh mana program telah menciptakan lapangan kerja, peningkatan pendapatan, peningkatan status kesehatan atau pendidikan, atau manfaat lain bagi wilayah atau kelompok masyarakat sasaran.



Dalam kedua jenis evaluasi itu, perlu dibuat penilaian kembali berdasarkan asumsi dasar dan rancangan program (suatu hal yang relatif tidak sering dilakukan). Faktanya adalah bahwa banyak program/kegiatan (dan kebijakan) gagal mencapai hasil yang diinginkan karena asumsi-asumsi dasar dan rancangan program itu sendiri tidak benar.

Langkah-langkah Melakukan Evaluasi

- Langkah 1: Melalui penyusunan rencana kerja, sepatatilah (a)apa yang akan dievaluasi (didasarkan pada hasil/manfaat yang telah ditentukan dalam rencana program dan dengan menggunakan sejumlah kecil indikator dan target kunci); (b)basis data yang akan digunakan, (c)kapan evaluasi akan dilaksanakan (biasanya setelah program berjalan 2-3 tahun);
- Langkah 2: Pilihlah pihak pelaksana evaluasi yang independen dan objektif (yang tidak dekat dengan pihak pengelola program). Misal: bila evaluasi akan dilakukan salah satu instansi pemerintah, sebaiknya pilihlah lembaga pemerintah di luar SKPD yang melaksanakan program. Pilihan lain adalah lembaga independen (seperti perguruan tinggi atau OMS) yang memiliki kapasitas. Sepakatilah metodologi yang akan digunakan (yang tidak terlalu kompleks). Temuilah wakil-wakil kelompok penerima manfaat serta beberapa OMS untuk bersama-sama merancang serta melaksanakan evaluasi.
- Langkah 3: Bahaslah laporan hasil evaluasi dengan pihak pelaksana evaluasi. Bila laporan sudah memenuhi syarat dan dianggap final, sebar luaskan untuk memperoleh umpan balik, kemudian atur pertemuan dengan pihak-pihak pelaksana program dan pemangku kepentingan lain untuk membahas hasil evaluasi serta menentukan langkah-langkah penyempurnaan program yang mungkin diperlukan.

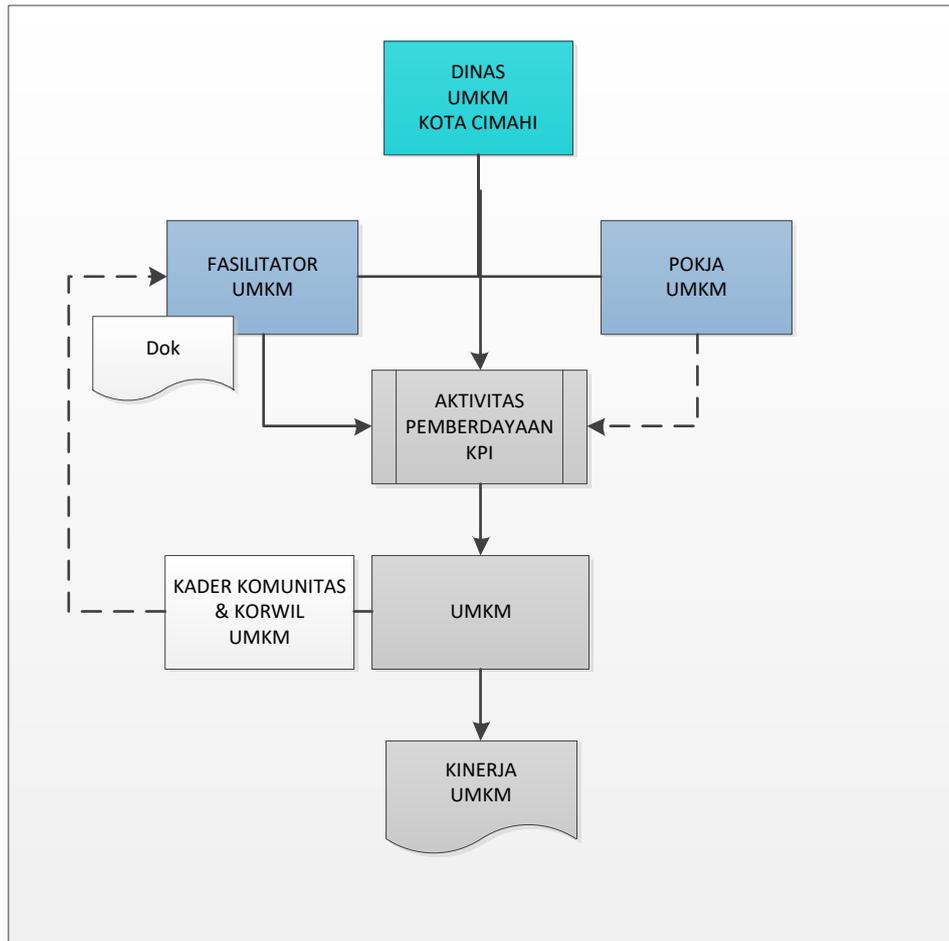
Beberapa Catatan Penting ► Untuk mengukur kemajuan, sudah jelas bahwa kita memerlukan gambaran konkret dan rinci tentang situasi awal atau data acuan (baseline). ► Tentang metodologi, evaluasi terbaik menggunakan kombinasi teknik-teknik kuantitatif dan teknik-teknik kualitatif. ► Dalam membuat analisis, kita harus sangat hati-hati dalam mengambil kesimpulan bahwa keseluruhan perubahan dalam suatu kondisi (atau indikator) yang direkam adalah hasil atau dampak dari program yang sedang dievaluasi. Mungkin ada faktor-faktor lain juga. Misalnya, peningkatan pendapatan rata-rata dalam kelompok penerima manfaat belum tentu seluruhnya berasal dari kegiatan program.

Para evaluator ahli yang cukup berpengalaman mempunyai teknik-teknik untuk membedakan antara dampak yang jelas dihasilkan oleh sebuah program atau kegiatan dan dampak yang berasal dari faktor-faktor lain.

6.4. Mekanisme Monitoring dan Evaluasi UMKM Kota CIMAHI

Mekanisme Monev Pemberdayaan UMKM di Kota Cimahi Melibatkan Seluruh Stakeholder di masing-masing Wilayah Kota, dengan Fokus Pada Pencapaian KPI Pemberdayaan secara simultan, dilakukan oleh Pemkot Selaku Pembina dan Fasilitator Pemberdayaan di Lapangan diketahui oleh Pokja UMKM di Kecamatan dan Kelurahan Setempat. Berikut Gambaran Mekanisme nya :

DIAGRAM 6.1. MONITORING & EVALUASI



Sumber : Data yang diolah oleh konsultan : 2015

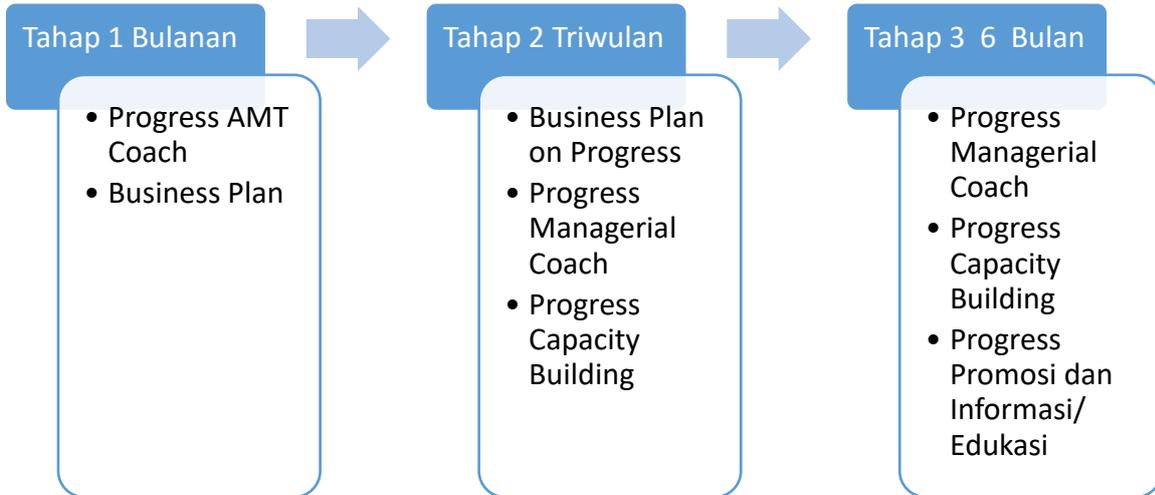
Stakeholder yang Terlibat dalam Aktivitas Monev ini adalah sebagai berikut :

Tabel 6.2. Keterlibatan Stakeholder

No	Stakeholder	Tugas
1	Dinas UMKM Pemkot Cimahi	Pembina Utama , Mengarahkan Kepada Panduan Pemberdayaan dan Panduan Monev Pemberdayaan, Penanggungjawab Kegiatan Sejak Perencanaan, dan Implementasi.
2	Pokja Kecamatan UMKM	Memantau Proses Perencanaan, Implementasi dan Monev , dan Mengetahui Kinerja UMKM, Bertanggungjawab Kepada Dinas UMKM
3	Fasilitator UMKM	Pendamping UMKM di Lapangan , Membina, Mendampingi, Melaksanakan 7 Aktivitas Pemberdayaan
4	Kader Masy UMKM/ Korwil UMKM	Kader Masyarakat/ Komunitas UMKM yang membantu setiap pelaksanaan program

Mekanisme Monev akan dilakukan dalam 3 Tahap untuk setiap jenis UMKM baik UMK Skala Mikro/ Start Up, UMK Skala Kecil dan UMK Skala Menengah , dengan pentahapan Kegiatan sebagai Berikut :

Diagram 6.2. TAHAPAN KEGIATAN MONEV



Sumber : Hasil Olahan Konsultan : 2015